

TAHAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: 188.342/9/HKM/XI/2013 DAN 188.342/448/DPRD-LT/XI/2013

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JUDUL RANPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD	SKPD TERKAIT
			BARU	UBAH			
1	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013	REALISASI APBD T.A 2013			UU NO 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA	DPPKAD	
2	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014	APBD PERUBAHAN T.A 2014			UU NO 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA	DPPKAD	
3	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015	APBD POKOK T.A 2015			UU NO 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA	DPPKAD	
4	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)	PENGATURAN TENTANG PEMBINAAN DAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DAERAH KAB. LUWU TIMUR	√		PP NO 43 THN 2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA	SATPOL PP	INSTANSI YANG MEMILIKI PPNS, BKPPD
5	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	PENGATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	√		PP NO 6 THN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATPOL PP	TARKIM, BAPPEDALD A, DINAS PERTANIAN, KECAMATAN DLL

6	PERUBAHAN PERDA NO 12 TAHUN 2011 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	a. PENGERTIAN DALAM BAB I KETENTUAN UMUM b. BEBERAPA MATERI DALAM PERDA PERDA NO 12 TAHUN 2011			UU NO 32 TAHUN 2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BAPEDALDA	
7	PERUBAHAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	a. PENGERTIAN DALAM BAB I KETENTUAN UMUM b. BEBERAPA MATERI DALAM PERDA PERDA NO 11 TAHUN 2011		√	- UU NOMOR 18 TAHUN 2008 - PP NOMOR 81 TAHUN 2012	BAPEDALDA	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
8	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH KAB. LUWU TIMUR	√		PP NO 28 THN 2012 TTG PELAKSANAAN UU NOMOR 43 TAHUN 2009 TTG KEARSIPAN	KANTOR PADD	
9	RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	RETRIBUSI UNTUK PELAYANAN PELABUHAN DAN DERMAGA PENYEBERANGAN	√		UU NO 28 THN 2009T TTG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH	DISHUBKOMINFO	DPPKAD
10	RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MALILI	- MENGGANTI PERATURAN DAERAH NO 32 TAHUN 2006 TTG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH IBUKOTA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2004-2014 - DASAR BAGI PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI - LANDASAN OPERASIONAL PEMANFAATAN & PENGENDALIAN RUANG		√	- UU NO 26 TAHUN 2007 TTG PENATAAN RUANG -PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2011 TTG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TAHUN 2011-2031 - PP 15 THN 2007 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - PERMEN PU NO 20/PRT/M/2010 TTG PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAB/KOTA	TARKIM	BAPPEDA
11	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	- TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DAERAH, HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI			- UU NO 24 TAHUN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA - PP NO 21 TAHUN 2008	BPBD	DISNAKERTRANSOS

√

		KEMASYARAKATAN, PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA			TTG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA - PERATURAN DAERAH NO 12 THN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR		
12	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	- USAHA JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT KERJA/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK - PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN			- UU NO 18 TAHUN 1999 TTG JASA KONSTRUKSI - PP NO 28 THN 2000 TTG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 92 THN 2010 - PP NO 30 THN 2000 TTG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	PU	KPPT